



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 dengan Baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan sasaran dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati Bangkalan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, administrasi dan organisasi serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai tugas pokok dan fungsi serta tujuan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta petunjuknya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan khususnya dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**
Ir. H. MOH. TAUFAN ZS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640610 199202 1 002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah	7
	2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	19
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Layanan	32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	33
	3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	33
	3.2 Telaahan renstra K/L dan Renstra	34
	3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
	3.4 Penentuan Isu Strategis	36
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	38
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	38
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	40
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	80
BAB VIII	PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan	12
Tabel 2.2.1	Daftar Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan	15
Tabel 2.2.2	Daftar Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Jabatan/Golongan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan	16
Tabel 2.2.3	Daftar Pendidikan Kedinasan Struktural	17
Tabel 2.2.4	Daftar Eselon / Jabatan	17
Tabel 2.2.5	Daftar Perlengkapan	17
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan	20
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	39
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah	41
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan	81
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tahapan pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra PD;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- c. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- d. penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah (PD) kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Proses persiapan penyusunan Renstra yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah meliputi Penyusunan Rancangan Renstra PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD, dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra PD juga menjadi tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 maka dengan pedoman inilah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 ini disusun

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang terkait dengan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 - 2026, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto – Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor .../...)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2026. Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini; dan
- b. menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 disusun secara sistematika yang terbagi dalam tiap-tiap bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang secara lengkap sistematika penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah

❖ Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

❖ Fungsi

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan fungsinya.

❖ Struktur Organisasi

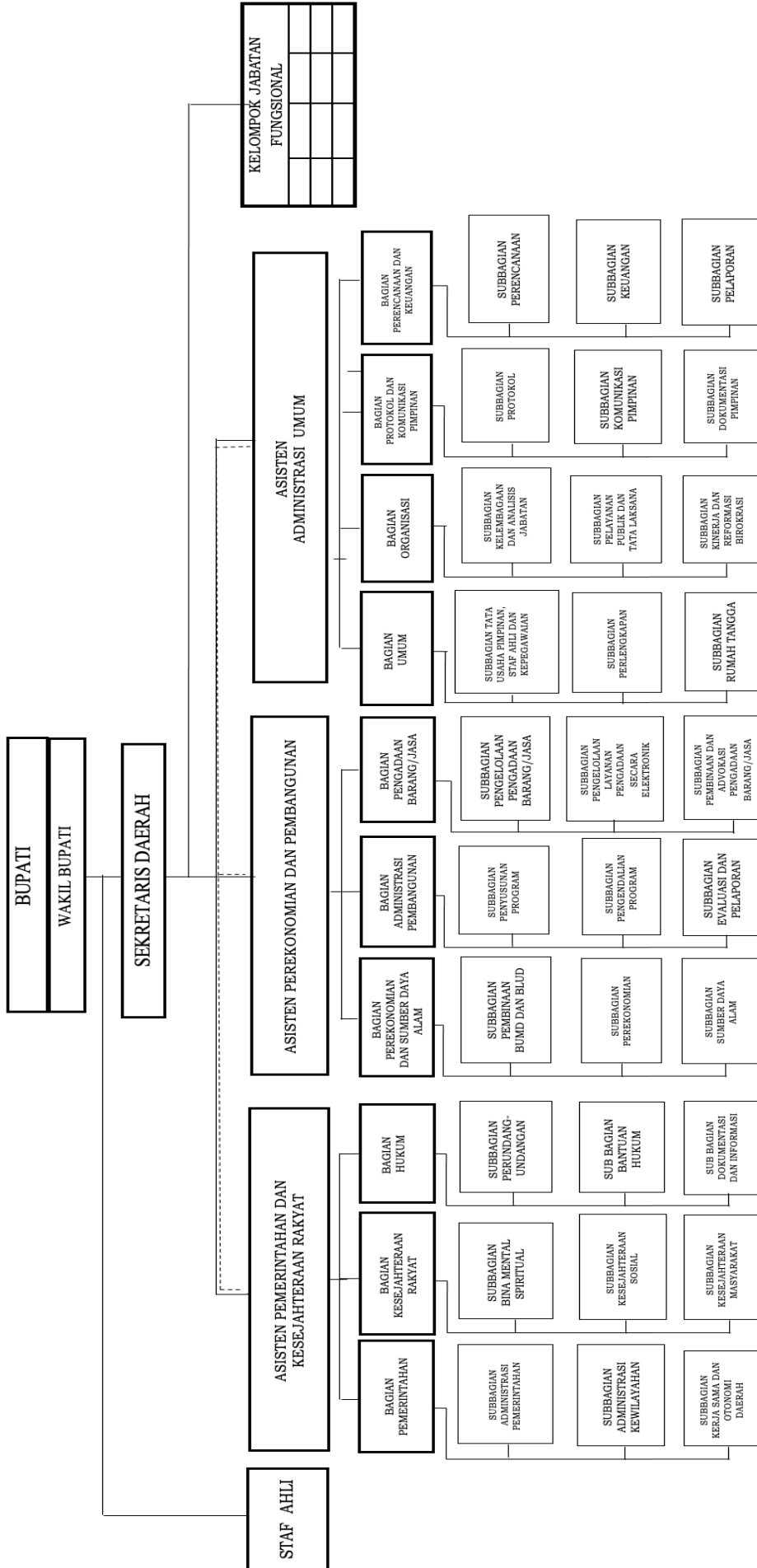
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;

- b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, membawahi :
- a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
- a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
- a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, membawahi :
- a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, membawahi:
- a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
- a) Subbagian Protokol;

- b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
- a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
- e. Staf Ahli Bupati;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Aspek pengelolaan pemerintahan selama kurun waktu Tahun 2019-2023 berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dengan pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Perengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi				100%	100%				100%	100%			-	100	100			
2	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan				78,50%	79%				78,50%	79%			-	100	100			
3	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan						79,50%	80,00%	80,50%			79,50%	80%	-			100	100	-
4	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	-	-	-	60%	70%	-	-	-	60%	50,00%	-	-	-	100	71	-	-	-
5	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik	-	-	-	80%	80%	-	-	-	80%	80%	-	-	-	100	100	-	-	-
6	Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKJIP	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100	100	-
7	Indeks kepuasan Pimpinan KDH dan WKDH				75%	76%				93%	92%			-	93	92			
8	Persentase informasi kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%				94%	70%			-	94	70			-
9	Persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan	-	-	-	100%	100%				96%	89%			-	96	89			-
10	Persentase kegiatan pimpinan yang di fasilitasi protokoler	-	-	-	100%	100%				91%	95%			-	91	95			
11	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						77%	78%	80%			92%	80%	-			92	80	
12	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan						40	94				12	72	-			30	77	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan						1	17				1	13	-			100	76	
14	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan						4	103				14	97	-			350	94	
15	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan				85%	85%	90%	-	-	105%	108%	93%	-	-	124	127	-		
16	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan				60%	70%	-	-	-	60%	50%	-	-	-	100	71			
17	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik				80%	80%	-	-	-	80%	80%	-	-	-	100	100			
18	Prosentase terfasilitasinya kegiatan bidang penataan organisasi				-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-			100	100	-
19	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan				85%	85%	90%	-	-	105%	108%	86%	-	-	124	127	95		
20	Presentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang menjadi Produk Hukum Daerah						-	100%	100%			-	100%	-	-			100	-
21	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	60%	70%	-	100	100	86	93	-
22	Jumlah Laporan Penyusunan Program Pembangunan yang difasilitasi	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-	NA	NA	NA	100	-
23	Jumlah Laporan Monitoring Kegiatan Fisik Konstruksi	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	100	100	100	100	-
24	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik (Bulanan/Triwulan/Semesteran)	-	-	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
25	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi				75%	75%	76%	77%	77%	83%	72%	87%	84%	-	111	96	114	109	-
26	Persentase Pelaksanaan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				75%	75%	76%	77%	77%	98%	98%	98%	93%	-	131	131	129	121	-
27	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi				75%	75%	76%	77%	77%	97%	97%	97%	99%	-	130	130	128	129	-

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) orang dan, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang.

Jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan kantor dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Daftar Komposisi Pegawai Menurut Jabatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten	3
3.	Staf Ahli	3
4.	Kepala Bagian	10
5.	Kepala Sub Bagian	30
	Jumlah	47

Tabel 2.2.2**Daftar Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan,
Jabatan/Golongan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**

No.	JENIS DATA	PNS	JUMLAH
Pendidikan			
1.	Pasca Sarjana	21	21
2.	Sarjana	132	132
3.	D3	2	2
4.	SMA	38	38
5.	SMP	1	1
Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan			
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	3
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	8	8
4.	Pembina (IV/a)	11	11
5.	Penata Tk.I (III/d)	55	55
6.	Penata (III/c)	30	30
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	30	30
8.	Penata Muda (III/a)	15	15
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	22	22
10.	Pengatur (II/c)	11	11
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	6	6
12.	Pengatur Muda (II/a)	1	1
13.	Juru Tk.I	1	1
14.	Juru	-	-
15.	Juru Muda Tk.I	-	-
16.	Juru Muda	-	-

Tabel 2.2.3**Daftar Pendidikan Kedinasan Struktural**

Spama/Diklatpim III	10 Orang
Adum/Diklatpim IV	30 Orang

Tabel 2.2.4**Daftar Eselon / Jabatan**

Eselon II	7 orang
Eselon III	10 orang
Eselon IV	30 orang

Untuk jabatan struktural sebanyak 47 jabatan terdiri dari 8 orang Eselon IIb, 10 orang Eselon III.a dan 30 orang Eselon IV.a. Selain itu telah banyak pula yang mengikuti Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis.

Untuk tabel daftar sarana dan prasarana dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.2.5**Daftar Perlengkapan**

No	Nama Barang	Jumlah
1	Gedung kantor	25
2	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	2
3	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	23
4	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	1
5	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2
6	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	1
7	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1
8	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	337
9	Mesin ketik	25
10	Mesin hitung	16
11	Mesin fotocopy	4
12	Mesin penghancur kertas	17
13	Tabung pemadam kebakaran	15
14	Peralatan kantor lainnya	34

No	Nama Barang	Jumlah
15	Papan data / reklame dan peta	15
16	Almari	32
17	Brankas	46
18	Filling kabinet	56
19	Rak	18
20	Peralatan industri rumah tangga	57
21	Pigura/gambar presiden dan wapres/lambang garuda	57
22	Papan nama/papan tulis	55
23	Vacum cleaner	13
24	Air conditioner	211
25	Kipas angin	44
26	Televisi	43
27	Genset	5
28	Peralatan rumah tangga	1048
29	Mesin potong rumput	6
30	Komputer/PC	146
31	Komputer notebook	124
32	Printer	153
33	Scanner	8
34	Monitor/display	12
35	UPS/stabilizer	52
36	Peralatan jaringan komputer	30
37	Meja kerja	346
38	Meja rapat	44
39	Meja makan	59
40	Kursi kerja	1070
41	Kursi rapat	1889
42	Sofa / kursi tamu	75

No	Nama Barang	Jumlah
43	Tabung gas	11
44	Kompor gas	17
45	Dispenser	35
46	Kulkas	18
47	Kamera	22
48	Handycam	2
49	LCD	31
50	Alat-alat studio lainnya	49
51	Telepon	1
52	Faximili	28
53	Radio HF/FM (handly talkie)	44
54	Alat-alat komunikasi lainnya	10
55	Karpet	10
56	Kompresor	1
57	Server	5

Ungkapan atas dasar Data Aset dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah, pilih Jenis Aset yang dominan penting.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Aspek pengelolaan pemerintahan selama kurun waktu Tahun 2019-2023 berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dengan pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bagian Perencanaan																	
Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	4.561.817.150	7.985.227.336				4.113.123.477	7.799.733.101				90,16 %	97,68 %				75,04%	89,63%
Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	1.989.563.050	2.801.657.523				1.762.411.658	2.697.565.633				88,58 %	96,28 %				40,82%	53,06%
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	2.572.254.100	5.183.569.813				2.350.711.819	5.102.167.468				91,39 %	98,43 %				101,52%	117,05%
Program Pelayanan Kesekretariatan	350.000.000	29.770.650				295.084.800	21.892.500				84,31 %	73,54 %				-91,49%	-92,58%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	350.000.000	29.770.650				295.084.800	21.892.500				84,31 %	73,54 %				-91,49%	-92,58%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18.035.889.838	18.901.265.902	19.236.204.189			17.606.195.862	18.689.749.017				97,62 %	98,88 %		4,80%	6,15%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	83.771.000	79.642.919	116.465.951			78.601.050	75.711.350				93,83 %	95,06 %	-	-4,93%	-3,68%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.074.650	15.607.100	61.474.100			22.365.000	14.430.900				96,92 %	92,46 %		-32,36%	-35,48%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.992.200	9.148.500	4.645.500			1.864.200	9.148.500				93,57 %	100,00 %		359,22%	390,75%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			930.200	6.163.500	5.590.600			695.400	6.163.500				74,76 %	100,00 %		562,60%	786,32%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			930.200	4.897.500	8.493.000			872.950	4.897.500				93,85 %	100,00 %		426,50%	461,03%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			930.200	5.367.500	5.164.151			761.600	5.175.800				81,87 %	96,43 %		477,03%	579,60%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			26.341.900	11.955.019	12.897.900			22.501.900	11.252.350				85,42 %	94,12 %		-54,62%	-49,99%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.571.650	26.503.800	18.200.700			29.540.000	24.642.800				99,89 %	92,98 %		-10,37%	-16,58%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	17.952.118.838	18.821.622.983	19.119.738.238			17.527.594.812	18.614.037.667				97,64 %	98,90 %	-	4,84%	6,20%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.773.871.469	18.737.116.333	19.046.192.838			17.360.131.312	18.533.830.217				97,67 %	98,92 %		5,42%	6,76%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.263.000	18.865.950	14.007.000			585.000	18.377.350				46,32 %	97,41 %		1393,74%	3041,43%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			155.627.670	17.798.650	16.798.000			151.480.000	15.220.650				97,33 %	85,52 %		-88,56%	-89,95%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.552.699	32.795.250	33.812.500			9.833.000	31.569.250				85,11 %	96,26 %		183,88%	221,05%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.804.000	15.046.800	8.927.900			5.565.500	15.040.200				56,77 %	99,96 %		53,48%	170,24%
JUMLAH	4.911.817.150	8.014.997.986	18.035.889.838	18.901.265.902	19.236.204.189	4.408.208.277	7.821.625.601	17.606.195.862	18.689.749.017	-	89,75 %	97,59 %	97,62 %	98,88 %		56,71%	61,85%
Bagian umum																	
Program Pelayanan Kesekretariatan	27.777.744.329	12.488.622.162	-	-	-	24.021.639.433	11.357.560.688	-	-	-	86,48 %	90,94 %				-55,04%	-52,72%
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	24.166.837.840	9.843.374.500	-	-	-	20.916.288.692	9.227.612.940	-	-	-	86,55 %	93,74 %				-59,27%	-55,88%
Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	2.193.979.139	1.636.372.012	-	-	-	1.973.975.641	1.176.712.348	-	-	-	89,97 %	71,91 %				-25,42%	-40,39%
Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai	688.850.000	553.241.000	-	-	-	663.890.500	544.475.000	-	-	-	96,38 %	98,42 %				-19,69%	-17,99%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	728.077.350	455.634.650	-	-	-	467.484.600	408.760.400	-	-	-	64,21 %	89,71 %				-37,42%	-12,56%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.686.381.000	19.086.748.000	15.606.746.000			20.795.831.264	17.851.217.993				87,80 %	93,53 %		-19,42%	-14,16%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	163.385.000			-	-				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-	-	4.755.000			-	-				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	4.755.000			-	-				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	149.120.000			-	-				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	-	4.755.000			-	-				0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			557.300.000	583.150.000	381.500.000			494.100.000	576.461.175				88,66%	98,85%		4,64%	16,67%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			492.800.000	508.150.000	331.500.000			487.100.000	501.461.175				98,84%	98,68%		3,11%	2,95%
Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			64.500.000	75.000.000	50.000.000			7.000.000	75.000.000				10,85%	100,00%		16,28%	971,43%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.091.344.550	1.729.310.779	1.605.054.700			1.427.375.752	1.612.076.810				68,25%	93,22%		-17,31%	12,94%
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.737.550	64.380.000	-			25.576.100	64.380.000				99,37%	100,00%		150,14%	151,72%
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			488.706.000	549.427.500	670.062.700			468.551.430	506.378.350				95,88%	92,16%		12,42%	8,07%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			452.959.000	273.955.000	311.500.000			318.448.495	261.228.750				70,30%	95,35%		-39,52%	-17,97%
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			199.175.000	230.607.500	49.925.000			192.622.500	229.692.800				96,71%	99,60%		15,78%	19,25%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			69.540.000	64.800.000	41.400.000			53.750.000	48.555.000				77,29 %	74,93 %		-6,82%	-9,67%
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			855.227.000	546.140.779	532.167.000			368.427.227	501.841.910				43,08 %	91,89 %		-36,14%	36,21%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.251.109.775	1.318.704.656	306.138.500			2.101.396.000	1.299.412.950				93,35 %	98,54 %		-41,42%	-38,16%
Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			211.000.000	-	-			211.000.000	-				100,00 %	0,00%		-100,00%	-100,00%
Sub kegiatan Pengadaan Mebel			160.454.800	195.661.100	-			143.187.000	193.731.000				89,24 %	99,01 %		21,94%	35,30%
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.879.654.975	1.123.043.556	306.138.500			1.747.209.000	1.105.681.950				92,95 %	98,45 %		-40,25%	-36,72%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.451.743.388	6.202.684.889	6.586.800.688			7.017.199.793	6.004.259.192				94,17 %	96,80 %		-16,76%	-14,44%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			48.720.000	47.020.000	47.020.000			27.272.000	46.374.000				55,98 %	98,63 %		-3,49%	70,04%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			943.978.310	918.467.389	1.009.258.188			901.790.858	906.229.793				95,53 %	98,67 %		-2,70%	0,49%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.698.804.000	1.464.160.000	1.790.160.000			1.568.111.420	1.379.572.000				92,31 %	94,22 %		-13,81%	-12,02%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.760.241.078	3.773.037.500	3.740.362.500			4.520.025.515	3.672.083.399				94,95 %	97,32 %		-20,74%	-18,76%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.718.600.072	2.852.238.730	2.341.363.107			2.997.264.651	2.687.878.391				80,60 %	94,24 %		-23,30%	-10,32%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			187.029.800	256.130.950	410.908.454			62.154.891	244.085.180				33,23 %	95,30 %		36,95%	292,70%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.440.069.330	1.030.669.480	887.805.528			882.091.210	966.886.072				61,25 %	93,81 %		-28,43%	9,61%
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.105.612.142	871.061.500	523.272.325			1.085.771.550	804.590.639				98,21 %	92,37 %		-21,21%	-25,90%
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			985.888.800	694.376.800	519.376.800			967.247.000	672.316.500				98,11 %	96,82 %		-29,57%	-30,49%
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.014.201.650	918.948.930	918.948.930			774.540.222	763.799.122				76,37 %	83,12 %		-9,39%	-1,39%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			318.948.930	318.948.930	318.948.930			164.540.222	163.799.122				51,59 %	51,36 %		0,00%	-0,45%
Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			10.000.000	-	-			10.000.000	-				100,00 %	0,00%		-100,00%	-100,00%
Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			85.252.720	-	-			-	-				0,00%	0,00%		-100,00%	0,00%
Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			600.000.000	600.000.000	600.000.000			600.000.000	600.000.000				100,00 %	100,00 %		0,00%	0,00%
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			6.602.081.565	5.481.710.016	3.303.555.075			5.983.954.846	4.907.330.353				90,64 %	89,52 %		-16,97%	-17,99%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			4.894.499.898	4.490.043.516	2.093.949.575			4.663.202.545	3.973.851.936				95,27 %	88,50 %		-8,26%	-14,78%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1.003.244.927	673.400.000	862.372.700			848.575.390	647.212.566				84,58 %	96,11 %		-32,88%	-23,73%
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			704.336.740	318.266.500	347.232.800			472.176.911	286.265.851				67,04 %	89,95 %		-54,81%	-39,37%
JUMLAH	27.777.744.329	12.488.622.162	23.686.381.000	19.086.748.000	15.606.746.000	24.021.639.433	11.357.560.688	20.795.831.264	17.851.217.993	-	86,48 %	90,94 %	87,80 %	93,53 %		-11,76%	-9,42%
Bagian Organisasi																	
Program kelembagaan dan analisis jabatan, Ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta pengembangan kinerja	1.055.600.000	522.872.511	-	-	-	626.036.429	488.726.261	-	-	-	59,31 %	93,47 %				-50,47%	-21,93%
Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan	261.000.000	150.085.164	-	-	-	144.494.800	146.285.164	-	-	-	55,36 %	97,47 %				-42,50%	1,24%
Kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	365.600.000	151.259.502	-	-	-	122.515.000	146.912.002	-	-	-	33,51 %	97,13 %				-58,63%	19,91%
Kegiatan Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja	429.000.000	221.527.845	-	-	-	359.026.629	195.529.095	-	-	-	83,69 %	88,26 %				-48,36%	-45,54%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Kegiatan Penataan Organisasi			499.025.000	434.971.000				388.167.400	417.776.148				77,79 %	96,05 %		-12,84%	7,63%
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			147.050.000	207.509.000				117.504.100	203.034.502				79,91 %	97,84 %		41,11%	72,79%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			97.400.000	101.306.000				53.628.000	94.302.509				55,06 %	93,09 %		4,01%	75,85%
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			120.800.000	84.990.400				117.127.000	82.564.537				96,96 %	97,15 %		-29,64%	-29,51%
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			63.600.000	14.856.000				60.600.000	11.870.000				95,28 %	79,90 %		-76,64%	-80,41%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja			70.175.000	26.309.600				39.308.300	26.004.600				56,01 %	98,84 %		-62,51%	-33,84%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemerintah Daerah																	
JUMLAH	1.055.600.000	522.872.511	499.025.000	434.971.000	-	626.036.429	488.726.261	388.167.400	417.776.148		59,31 %	93,47 %	77,79 %	96,05 %		-25,59%	-12,61%
Bagian Prokopim																	
Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolanan dan kehumasan	1.163.900.000	930.701.098	-	-	-	1.088.199.023	862.863.098	-	-	-	93,50 %	92,71 %				-20,04%	-20,71%
Penyebarluasan informasi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah	150.000.000	612.964.600	-	-	-	142.351.700	586.869.000	-	-	-	94,90 %	95,74 %				308,64%	312,27%
Koordinasi kehumasan Bupati wakil bpati dan Sekretaris Daerah	390.000.000	40.630.000	-	-	-	374.775.000	28.405.000	-	-	-	96,10 %	69,91 %				-89,58%	-92,42%
Koordinasi Keprotokolanan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	623.900.000	277.106.498	-	-	-	571.072.323	247.589.098	-	-	-	91,53 %	89,35 %				-55,58%	-56,64%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota																	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			667.177.300	903.682.000				547.484.850	701.642.775				82,06 %	77,64 %		35,45%	28,16%
Fasilitasi Keprotokolanan			312.587.800	406.076.000				228.392.100	330.339.625				73,06 %	81,35 %		29,91%	44,64%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			18.462.750	70.333.750				18.462.750	65.973.750				100,00 %	93,80 %		280,95%	257,33%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan			336.126.750	427.272.250				300.630.000	305.329.400				89,44 %	71,46 %		27,12%	1,56%
JUMLAH	1.163.900.000	930.701.098	667.177.300	903.682.000	-	1.088.199.023	862.863.098	547.484.850	701.642.775		93,50 %	92,71 %	82,06 %	77,64 %		-8,09%	-13,61%
Bagian Pemerintahan																	
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.060.426.460	505.667.927	-	-	-	1.250.518.194	350.866.527	-	-	-	60,69 %	69,39 %				-75,46%	-71,94%
Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum	870.426.460	194.714.500	-	-	-	389.260.557	81.752.750	-	-	-	44,72 %	41,99 %				-77,63%	-79,00%
Fasilitasi Bina Kecamatan dan Kelurahan	185.000.000	44.750.307	-	-	-	67.055.438	41.488.207	-	-	-	36,25 %	92,71 %				-75,81%	-38,13%
Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	355.000.000	157.128.120	-	-	-	188.493.099	137.639.420	-	-	-	53,10 %	87,60 %				-55,74%	-26,98%
Program Pelayanan Kesekretariatan	650.000.000	109.075.000	-	-	-	605.709.100	89.986.150	-	-	-	93,19 %	82,50 %				-83,22%	-85,14%
Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasi	650.000.000	109.075.000	-	-	-	605.709.100	89.986.150	-	-	-	93,19 %	82,50 %				-83,22%	-85,14%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
onal																	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																	
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			267.978.500	573.279.000	634.355.000			235.866.079	545.523.197	-			88,02 %	95,16 %		113,93%	131,29%
Sub Penataan Administrasi Pemerintahan			39.769.000	339.177.100	401.753.250			15.432.350	317.853.747	-			38,80 %	93,71 %		-61,20%	1959,66%
Sub Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			122.167.200	178.461.200	126.630.150			121.004.813	177.329.850	-			99,05 %	99,37 %		-0,95%	46,55%
Sub Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			106.042.300	55.640.700	105.971.600			99.428.916	50.339.600	-			93,76 %	90,47 %		-6,24%	-49,37%
JUMLAH	2.060.426.460	505.667.927	267.978.500	573.279.000	634.355.000	1.250.518.194	350.866.527	235.866.079	545.523.197		60,69 %	69,39 %	88,02 %	95,16 %		-34,72%	-24,16%
Bagian kesra																	
Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	2.025.000.000	781.725.000	-	-	-	1.870.036.200	657.480.000	-	-	-	92,35 %	84,11 %				-61,40%	-64,84%
Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan	1.729.440.000	624.275.000	-	-	-	1.613.811.300	534.710.000	-	-	-	79,69 %	85,65 %				-69,17%	-66,87%
Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial	223.365.000	148.100.000	-	-	-	194.255.500	113.470.000	-	-	-	11,23 %	76,62 %				-91,44%	-41,59%
Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	72.195.000	9.350.000	-	-	-	61.969.400	9.300.000	-	-	-	85,84 %	99,47 %				-87,05%	-84,99%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																	
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			6.409.342.000	11.019.212.000				6.405.942.150	10.987.567.523				99,95 %	99,71 %		71,92%	71,52%
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1.775.451.450	2.844.331.300				1.772.455.600	2.812.686.823				99,83 %	98,89 %		60,20%	58,69%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			3.116.890.550	3.960.563.100				3.116.775.550	3.960.563.100				100,00 %	100,00 %		27,07%	27,07%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja			1.517.000.000	4.214.317.600				1.516.711.000	4.214.317.600				99,98 %	100,00 %		177,81%	177,86%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
JUMLAH	2.025.000.000	781.725.000	6.409.342.000	11.019.212.000	-	1.870.036.200	657.480.000	6.405.942.150	10.987.567.523		92,35 %	84,11 %	99,95 %	99,71 %		75,89%	80,45%
Bagian Hukum																	
Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	877.326.000	688.836.802	-	-	-	539.451.349	389.695.500	-	-	-	61,49 %	56,57 %				-21,48%	-27,76%
Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	370.000.000	189.471.350	-	-	-	210.146.650	19.471.350	-	-	-	56,80 %	10,28 %				-48,79%	-90,73%
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	480.000.000	339.440.102	-	-	-	306.545.750	211.043.000	-	-	-	63,86 %	62,17 %				-29,28%	-31,15%
Kegiatan Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	287.326.000	159.925.350	-	-	-	282.758.949	159.181.150	-	-	-	83,29 %	99,53 %				485,25%	599,42%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																	
Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum			518.600.000	506.636.000	381.178.000			383.805.000	385.390.945	-			74,01 %	76,07 %		-2,31%	0,41%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah			162.741.250	159.607.000	163.489.000			141.722.000	145.118.000				87,08 %	90,92 %		-12,92%	2,40%
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum			321.592.000	299.162.000	117.689.000			212.895.000	207.671.500				66,20 %	69,42 %		-33,80%	-2,45%
Sub Kegiatan Pengdokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan Informasi Hukum			34.266.750	47.867.000	100.000.000			29.188.000	32.601.445				85,18 %	68,11 %		-14,82%	11,69%
JUMLAH	877.326.000	688.836.802	518.600.000	506.636.000	381.178.000	539.451.349	389.695.500	383.805.000	385.390.945		61,49 %	56,57 %	74,01 %	76,07 %		-16,73%	-10,60%
Bagian Perekonomian																	
Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	975.000.000	436.998.000	-	-	-	918.132.647	430.223.400	-	-	-	94,17 %	98,45 %				-55,18%	-53,14%
Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan	125.000.000	57.665.600	-	-	-	116.224.050	54.170.600	-	-	-	92,98 %	93,94 %				-53,87%	-53,39%
Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pembinaan dan	600.000.000	236.130.400	-	-	-	558.588.193	233.183.300	-	-	-	93,10 %	98,75 %				-60,64%	-58,25%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
pengembangan produk daerah																	
Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan evaluasi bidang penanaman modal dan BUMD	250.000.000	143.202.000	-	-	-	243.320.404	142.869.500	-	-	-	97,33 %	99,77 %				-42,72%	-41,28%
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	60.000.000	188.412.049	-	-	-	44.724.000	173.883.750	-	-	-	74,54 %	92,29 %				214,02%	288,79%
Kegiatan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	60.000.000	188.412.049	-	-	-	44.724.000	173.883.750	-	-	-	74,54 %	92,29 %				214,02%	288,79%
Program Perekonomian dan Pembangunan																	
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	345.000.000	103.000.000	152.033.000	-	-	209.280.900	80.320.000	-			60,66 %	77,98 %		-70,14%	-61,62%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	180.000.000	71.000.000	107.033.000	-	-	165.571.000	65.239.500	0			91,98 %	91,89 %		-60,56%	-60,60%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	105.000.000	25.000.000	40.000.000	-	-	40.334.900	14.180.500	0			38,41 %	56,72 %		-76,19%	-64,84%
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	60.000.000	7.000.000	5.000.000	-	-	3.375.000	900.000	0			5,63%	12,86 %		-88,33%	-73,33%
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	441.043.000	175.230.650	55.000.000	-	-	187.068.000	130.524.400	-			42,41 %	74,49 %		-60,27%	-30,23%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	-	-	431.043.000	160.230.650	45.000.000	-	-	187.068.000	127.134.900	0			43,40 %	79,34 %		-62,83%	-32,04%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	5.000.000	5.000.000	8.000.000	-	-	-	1.097.000	0			0,00%	21,94 %		0,00%	0,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	5.000.000	10.000.000	2.000.000	-	-	-	2.292.500	0			0,00%	22,93 %		100,00%	#DIV/0!

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	853.500.000	259.538.350	-	-	-	739.853.250	259.538.350	-			86,68 %	100,00 %		-69,59%	-64,92%
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	853.500.000	259.538.350	-	-	-	739.853.250	259.538.350	0			86,68 %	100,00 %		-69,59%	-64,92%
JUMLAH	1.035.000.000	625.410.049	1.639.543.000	537.769.000	207.033.000	962.856.647	604.107.150	1.136.202.150	470.382.750	-	93,03 %	96,59 %	69,30 %	87,47 %		-19,61%	-21,24%
Bagian Adbang																	
Program Pelayanan Kesekretariatan	700.000.000	139.758.550				487.090.594	95.308.550										
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	375.000.000	103.943.750				168.333.594	71.358.750										
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	325.000.000	35.814.800				318.757.000	23.949.800										
Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	234.000.000	320.710.304	-	-	-	186.931.107	304.631.004	-	-	-	79,89 %	94,99 %				37,06%	62,96%
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	234.000.000	102.655.121	-	-	-	186.931.107	93.845.080	-	-	-	79,89 %	91,42 %				-56,13%	-49,80%
Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah	-	320.710.304	-	-	-	-	304.631.004	-	-	-	-	94,99 %				-	-
Program Perekonomian dan Pembangunan																	
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			209.135.000	185.143.000				207.533.590	177.638.533				99,23 %	95,95 %		-11,47%	-14,40%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan			49.723.250	57.496.750				49.656.650	52.080.954				99,87 %	90,58 %		15,63%	4,88%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program			49.896.500	46.885.450				48.867.690	46.415.639				97,94 %	99,00 %		-6,03%	-5,02%
Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			109.515.250	80.760.800				109.009.250	79.141.940				99,54 %	98,00 %		-26,26%	-27,40%
JUMLAH	934.000.000	460.468.854	209.135.000	185.143.000	-	674.021.701	399.939.554	207.533.590	177.638.533	-	72,17 %	86,85 %	99,23 %	95,95 %		-41,69%	-35,89%

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bagian Bpbj																	
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	1.395.203.211	1.478.915.403	778.495.200	599.935.000	660.403.000	1.332.419.067	1.405.709.091	740.029.696	544.643.700	-	95,50 %	95,05 %	95,05 %	90,78 %		-22,94%	-26,40%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	431.860.800	521.447.818	215.482.600	188.000.000	182.000.000	359.189.788	374.811.988	187.038.000	157.550.000	-	83,17 %	71,87 %	86,79 %	83,80 %		-12,75%	-15,77%
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	693.410.508	671.339.768	497.477.950	346.062.600	334.865.000	679.542.298	660.262.662	489.270.046	322.099.000	-	98,00 %	98,35 %	98,35 %	93,07 %		-30,44%	-34,17%
Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa	269.931.903	286.127.817	65.534.650	65.872.400	143.538.000	262.454.789	278.202.076	63.721.650	64.994.700	-	97,22 %	97,22 %	97,23 %	99,17 %		0,52%	2,00%
JUMLAH	1.395.203.211	1.478.915.403	778.495.200	599.935.000	660.403.000	1.332.419.067	1.405.709.091	740.029.696	544.643.700		95,50 %	95,05 %	95,05 %	90,78 %		-24,52%	-25,79%

Dari tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah, Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2019 dan 2020 rata-rata mengalami peningkatan di tiap program dan kegiatannya. Kecuali pada Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan, mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Sedangkan untuk Rata-rata Pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran ke bidang penanganan pandemi *corona virus disease* 2019.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan.

Sebagai pembuat regulasi di level Kabupaten fungsi Sekretariat Daerah sangat vital dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan setiap pembentukan regulasi dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, kedalam berbagai macam kebijakan secara legal formal dalam bentuk produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah , Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Adapun beberapa kebijakan nasional yang perlu ditindak lanjuti melalui regulasi daerah, seperti kebijakan Reformasi Birokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penataan organisasi.

Selain berfungsi menjalankan fungsi penataan regulasi Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas Perangkat Daerah atas semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di wilayah kabupaten. Peran sentra yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki kompetensi kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasikan berbagai kebijakan diatas untuk diterapkan di daerah.

BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Perwujudan good governance merupakan tuntutan dan harapan yang mesti dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Implementasi pencapaian good governance tersebut diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dikeluarkannya berbagai regulasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan aspiratif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat menuntut setiap instansi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang dikeluarkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Daerah memiliki beberapa hambatan, yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;
3. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya;

4. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, tetap berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen dimaksud maka langkah-langkah untuk melakukan analisis juga menggunakan langkah-langkah dengan metode yang sama. Secara umum kebijakan, rencana dan program (KRP) yang terintegrasikan dalam matriks rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan penandanaan indikatif Tahun 2024-2026 tidak terdapat indikasi yang menyebabkan peluang kerusakan lingkungan skala makro maupun mikro. Karena kebijakan, rencana dan program (KRP) Perangkat Daerah yang direncanakan akan diselenggarakan Tahun 2024-2026. Pada Sekretariat Daerah hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi rutin untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan umum dan pelayanan lainnya ke masyarakat secara langsung.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat bukan dinas yang bersentuhan langsung dengan RT/RW tahun 2009-2029. Namun dalam pembuatan kebijakan harus memperhatikan kebijakan yang tertuang pada RT/RW tahun 2009-2029, salah satunya kebijakan penetapan kawasan strategis. Kebijakan penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangkalan dilakukan pada kawasan yang memiliki Pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah sekitarnya, kegiatan lain yang sejenis maupun tidak sejenis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat strategi penataan dan kawasan strategi dilingkungan dengan :

1. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
2. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya;
4. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
5. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sesuai pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD, ada beberapa Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung pada KLHS. Tetapi Sekretariat Daerah tidak langsung mengakomodir kebijakan yang ada pada KLHS. Kebutuhan Sekretariat Daerah terhadap KLHS hanya pada memperhatikan KLHS pada lingkup kegiatan pelaksanaan, untuk program tidak ada yang langsung terkait KLHS.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada faktor-faktor permasalahan pelayanan.

Permasalahan pelayanan pada Sekretariat Daerah, yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;
3. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;
4. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan utamanya ketegasan dan komitmen pimpinan.

Isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur baik dari segi disiplin maupun kinerja;
2. Optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi baik secara intern maupun ekstern;
3. Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

❖ Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Sekretariat dan Perangkat Daerah lainnya;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran Renstra dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu strategis Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah						Sasaran Perangkat Daerah					
Uraian	Indikator	Target				Uraian	Indikator	Target			
		2024	2025	2026	Transisi 2027			2024	2025	2026	Transisi 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berkualitas	Nilai SAKIP	(BB) 70.23	(BB) 71.23	(BB) 72.25		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	100%	100%	100%	
	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)							
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84,45	84,55	84,65							
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah urusan Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	60,5	61	61,5	61,5
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	85	86	87	88

4.2. Cascading Kinerja Sekretariat Daerah

Cascading Kinerja Sekretariat Daerah adalah Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-3 (akhir periode Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan) yang mana tujuannya adalah Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berkualitas. Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi pembangunan, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah.

Adapun Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Sekretariat Daerah

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bagian Perencanaan												
	Prosentase ketercapaian Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah												
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah											
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80,5 indeks	19.153.089.568	100 indeks	19.629.927.398	100 indeks	19.821.427.460	100 indeks	19.855.427.460
				Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80,50%	52.432.830	100%	74.280.000	100%	109.280.000	100%	109.280.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.044.000	3 Dokumen	25.921.000	3 Dokumen	35.921.000	3 Dokumen	35.921.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.578.000	1 Dokumen	7.897.500	1 Dokumen	11.897.500	1 Dokumen	11.897.500
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.243.200	1 Dokumen	5.626.600	1 Dokumen	8.626.600	1 Dokumen	8.626.600
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.217.000	1 Dokumen	9.217.000	1 Dokumen	13.217.000	1 Dokumen	13.217.000
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.608.030	1 Dokumen	4.875.300	1 Dokumen	7.875.300	1 Dokumen	7.875.300
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.025.900	2 Laporan	9.525.900	2 Laporan	14.525.900	2 Laporan	14.525.900
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.716.700	4 Laporan	11.216.700	4 Laporan	17.216.700	4 Laporan	17.216.700
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		80,50%	19.100.656.738	100%	19.555.647.398	100%	19.712.147.460	100%	19.746.147.460
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203 Org/Bulan	19.065.036.838	210 Org/Bulan	19.507.632.839	222 Org/Bulan	19.644.132.839	234 Org/Bulan	19.675.632.839
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.025.500	1 Dokumen	12.350.000	1 Dokumen	17.350.000	1 Dokumen	17.350.000
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.793.000	1 Dokumen	6.775.059	1 Dokumen	9.775.121	1 Dokumen	9.775.121

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.929.500	1 Laporan	19.929.500	1 Laporan	26.929.500	1 Laporan	26.929.500
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.871.900	12 Laporan	8.960.000	12 Laporan	13.960.000	12 Laporan	16.460.000
2	Bagian Umum												
	Prosentase ketercapaian Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah												
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah											
			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80,5 indeks	13.233.401.000	100 indeks	11.727.544.000	100 indeks	12.078.315.000	100 indeks	12.080.815.000
				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100%	-	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- dok	-	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	-	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	-	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Laporan	-	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	281.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket	231.000.000	6 Paket	150.000.000	6 Paket	150.000.000	6 Paket	150.000.000
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.067.186.400	100%	652.990.000	100%	698.342.720	100%	700.842.720
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket	345.570.400	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	130.200.000	7 Paket	185.000.000	10 Paket	185.000.000	10 Paket	185.000.000
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	37.300.000	5 Paket	31.750.000	5 Paket	31.750.000	5 Paket	31.750.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	41.400.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	512.716.000	150 Laporan	200.000.000	150 Laporan	245.352.720	150 Laporan	247.852.720
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	101.419.300	100%	184.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	100.000.000	- Unit	-
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	3 Unit	84.000.000	- Unit	-	1 Unit	50.000.000
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	101.419.300	5 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	150.000.000
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.477.548.188	100%	6.426.600.000	100%	6.426.600.000	100%	6.426.600.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	47.020.000	24 Laporan	40.000.000	24 Laporan	40.000.000	24 Laporan	40.000.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.009.258.188	36 Laporan	1.100.000.000	36 Laporan	1.100.000.000	36 Laporan	1.100.000.000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1.745.160.000	11 Laporan	1.351.000.000	11 Laporan	1.351.000.000	11 Laporan	1.351.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41 Laporan	3.676.110.000	41 Laporan	3.935.600.000	41 Laporan	3.935.600.000	41 Laporan	3.935.600.000
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	2.029.313.107	100%	875.473.473	100%	875.473.473	100%	875.473.473
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	410.908.454	20 Unit	195.000.000	20 Unit	195.000.000	20 Unit	195.000.000
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	887.805.528	10 Unit	284.473.473	10 Unit	284.473.473	10 Unit	284.473.473
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	253.222.325	3 Unit	197.000.000	3 Unit	197.000.000	3 Unit	197.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	372 Unit	477.376.800	100 Unit	199.000.000	100 Unit	199.000.000	100 Unit	199.000.000
					Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	918.948.930	100%	918.948.930	100%	918.948.930	100%	918.948.930
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	318.948.930	2 Orang/ Bulan	318.948.930	2 Orang/ Bulan	318.948.930	2 Orang/ Bulan	318.948.930

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000
				Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi		100%	2.357.985.075	100%	2.453.531.597	100%	2.742.949.877	100%	2.742.949.877
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	1.718.299.975	18 Paket	1.733.531.597	18 Paket	1.792.949.877	18 Paket	1.792.949.877
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	381.685.100	12 Paket	500.000.000	12 Paket	650.000.000	12 Paket	650.000.000
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	11 Paket	258.000.000	11 Paket	220.000.000	11 Paket	300.000.000	11 Paket	300.000.000
3	Bagian Organisasi												
	Prosentase ketercapaian Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah												
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah											
		Nilai Sakip Sekretariat Daerah											
			Persentase Terfasilitasinya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi			100%	204.834.000	100%	222.506.000	100%	277.506.000	100%	280.006.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun		100%	204.834.000	100%	222.506.000	100%	277.506.000	100%	280.006.000
				Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen	40.200.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000
				Jumlah laporan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	57.000.000	1 Laporan	32.000.000
				Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	18.634.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	26.000.000
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.506.000	1 Dokumen	22.506.000	1 Dokumen	23.000.000
				Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dokumen	101.000.000	1 Dokumen	106.000.000	1 Dokumen	106.000.000	1 Dokumen	139.006.000
4	Bagian Prokopim												
	Prosentase ketercapaian Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah												
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah		Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Difasilitasi			100%	148.181.000	100%	200.876.000	100%	255.876.000	100%	258.376.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		81%	148.181.000	82%	200.876.000	83%	255.876.000	85%	258.376.000
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		41 laporan	103.181.000	40 Laporan	100.000.000	45 Laporan	155.000.000	48 Laporan	158.000.000
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		2 Laporan	5.000.000	18 Laporan	30.876.000	18 Laporan	30.876.000	18 Laporan	30.376.000
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		2 Laporan	40.000.000	5 Laporan	70.000.000	5 Laporan	70.000.000	5 Laporan	70.000.000
5	Bagian Pemerintahan												
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan					100%		100%		100%		100%	
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan											
			Presentase Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan			100%	364.091.000	100%	342.974.000	100%	397.974.000	100%	400.474.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Presentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100%	364.091.000	100%	342.974.000	100%	397.974.000	100%	400.474.000
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	131.489.250	5 Dokumen	130.291.350	5 Dokumen	165.372.250	5 Dokumen	167.872.250	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	126.630.150	3 Dokumen	126.630.150	3 Dokumen	126.630.150	3 Dokumen	126.630.150	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	105.971.600	4 Dokumen	86.052.500	4 Dokumen	105.971.600	4 Dokumen	105.971.600	
6	Bagian Kesra												
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah											
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan			100%	5.662.800.000	100%	6.847.604.000	100%	6.902.604.000	100%	6.905.104.000
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan			100%	5.662.800.000	100%	6.847.604.000	100%	6.902.604.000	100%	6.905.104.000
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	44 Dokumen	5.437.007.500	31 Dokumen	1.400.000.000	31 Dokumen	1.455.000.000	31 Dokumen	1.457.500.000	

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	37 Dokumen	200.975.750	6 Dokumen	2.760.000.000	6 Dokumen	2.760.000.000	6 Dokumen	2.760.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	63 Dokumen	24.816.750	44 Dokumen	2.687.604.000	44 Dokumen	2.687.604.000	44 Dokumen	2.687.604.000
7	Bagian Hukum												
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui inovasi, perencanaan berkualitas dan pelayanan publik					100%		100%		100%		100%	

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah bidang Hukum											
			Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan			100%	264.969.000	100%	159.113.000	100%	214.113.000	100%	216.613.000
				Presentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	264.969.000	100%	159.113.000	100%	214.113.000	100%	216.613.000
					Jumlah Produk Hukum yang Disusun	3 Dokumen	57.669.000	3 Dokumen	59.113.000	3 Dokumen	94.113.000	3 Dokumen	94.613.000
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	203.204.000	3 Kasus	50.000.000	3 Kasus	70.000.000	3 Kasus	72.000.000
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	4.096.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000
8	Bagian Perekonomian												
	Prosentase ketercapaian Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah												

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah bidang Perekonomian											
			Persentase Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Tersusun			80%	100.000.000	100%	83.453.000	100%	138.453.000	100%	140.953.000
				Jumlah Dokumen Bidang Perekonomian Yang Tersusun			75.000.000		58.453.000		98.453.000		100.953.000
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	33.453.000	1 Dokumen	58.453.000	1 Dokumen	60.953.000
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	22.500.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
				Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam Yang Tersusun			25.000.000		25.000.000		40.000.000		40.000.000

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
9	Bagian Adbang												
	Prosentase ketercapaian Kinerja Program Urusan Sekretariat Daerah												
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah bidang Pembangunan yang diselesaikan											

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan			100%	100.000.000	100%	144.088.000	100%	199.088.000	100%	201.588.000
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang Difasilitasi		100%	100.000.000	100%	144.088.000	100%	199.088.000	100%	201.588.000
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	13.337.150	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	35.255.550	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	51.407.300	18 Laporan	64.088.000	18 Laporan	99.088.000	18 Laporan	81.588.000
10	Bagian BPBJ												
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah												
		Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa											

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							
						2023		2024		2025		2026	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelanggaran PBJ			100 indeks	415.609.000	100 indeks	1.107.096.000	100 indeks	1.162.096.000	100 indeks	1.164.596.000
				Presentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Terfasilitasi		100%	415.609.000	100%	1.107.096.000	100%	1.162.096.000	100%	1.164.596.000
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	330.000.000	5 Dokumen	330.000.000	5 Dokumen	330.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	196.019.000	5 Dokumen	482.865.000	5 Dokumen	482.865.000	5 Dokumen	482.865.000
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 Orang	69.590.000	68 Orang	294.231.000	68 Orang	349.231.000	68 Orang	351.731.000
JUMLAH							39.646.974.568		40.465.181.398		41.447.452.460		41.503.952.460

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam tiga tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Isu Strategis :			
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur baik dari segi disiplin maupun kinerja			
2. Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			
Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi			
Sasaran :			
1. Nilai SAKIP			
2. Status Kinerja LPPD			
3. Indeks Kepuasan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah urusan Sekretariat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang lebih baik 2. fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas pelaporan kinerja atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran 2. Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk program dan kegiatan tahun 2019 dan 2020 masih menggunakan program dan kegiatan lama sesuai Renstra Tahun 2018-2023, sedangkan untuk program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
10. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

11. Kegiatan Penataan Organisasi

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

- a. Sub Kegiatan Penataan administrasi pemerintahan
- b. Sub kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan
- c. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah

2. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- a. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- b. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- c. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
- c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

C. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian
 - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tersaji pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik berkualitas				- Nilai SAKIP - Status Kinerja LPPD - Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			40.465.181.398		41.447.452.460		41.503.952.460		123.416.586.318		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan urusan Sekretariat Daerah			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		60,5 Nilai		61 Nilai		61,5 Nilai		61,5 Nilai			
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah		85 indeks	31.780.853.398	86 indeks	32.433.124.460	87 indeks	32.474.624.460	87 indeks	96.688.602.318		
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 indeks		100 indeks		100 indeks		100 indeks			
				Prosentase Terfasilitasnya Kegiatan Bidang Penataan Organisasi		100%	31.780.853.398	100%	32.433.124.460	100%	32.474.624.460	100%	96.688.602.318		
				Persentase pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi		100%		100%		100%		100%			
														Bag. Perencanaan dan Keuangan Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Prokopim	Kab. Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	74.280.000	100%	109.280.000	100%	109.280.000	100%	292.840.000	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokume n	25.921.000	3 Dokume n	35.921.000	3 Dokume n	35.921.000	3 Dokume n	97.763.000	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokume n	7.897.500	1 Dokume n	11.897.500	1 Dokume n	11.897.500	1 Dokume n	31.692.500	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokume n	5.626.600	1 Dokume n	8.626.600	1 Dokume n	8.626.600	1 Dokume n	22.879.800	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		1 Dokume n	9.217.000	1 Dokume n	13.217.000	1 Dokume n	13.217.000	1 Dokume n	35.651.000	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1 Dokume n	4.875.300	1 Dokume n	7.875.300	1 Dokume n	7.875.300	1 Dokume n	20.625.900	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	9.525.900	2 Laporan	14.525.900	2 Laporan	14.525.900	2 Laporan	38.577.700	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	11.216.700	4 Laporan	17.216.700	4 Laporan	17.216.700	4 Laporan	45.650.100	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	19.555.647.398	100%	19.712.147.460	100%	19.746.147.460	100%	59.013.942.318	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		210 Org/ Bulan	19.507.632.839	222 Org/ Bulan	19.644.132.839	234 Org/ Bulan	19.675.632.839	234 Org/ Bulan	58.827.398.517	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokume n	12.350.000	1 Dokume n	17.350.000	1 Dokume n	17.350.000	1 Dokume n	47.050.000	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokume n	6.775.059	1 Dokume n	9.775.121	1 Dokume n	9.775.121	1 Dokume n	26.325.301	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	19.929.500	1 Laporan	26.929.500	1 Laporan	26.929.500	1 Laporan	73.788.500	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Laporan	8.960.000	12 Laporan	13.960.000	12 Laporan	16.460.000	12 Laporan	39.380.000	Bag. Perencana dan Keuangan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	16.000.000	100%	48.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 3.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	4.000.000	2 dok	12.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 3.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	12.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 3.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	12.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 3.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	12.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	600.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 5.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		8 Paket	150.000.000	8 Paket	150.000.000	8 Paket	150.000.000	8 Paket	450.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 5.11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	150.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	652.990.000	100%	698.342.720	100%	700.842.720	100%	2.052.175.440	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 6.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	10 Paket	600.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 6.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 Paket	185.000.000	10 Paket	185.000.000	10 Paket	185.000.000	10 Paket	555.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 6.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	31.750.000	5 Paket	31.750.000	5 Paket	31.750.000	5 Paket	95.250.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 6.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	108.720.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 6.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	200.000.000	150 Laporan	245.352.720	150 Laporan	247.852.720	150 Laporan	725.205.440	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	184.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	600.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 7.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		- Unit	-	2 Unit	100.000.000	- Unit	-	2 Unit	100.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 7.05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	84.000.000	- Unit	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 7.10	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	150.000.000	15 Unit	350.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	6.426.600.000	100%	6.426.600.000	100%	6.426.600.000	100%	19.279.800.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 8.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24 Laporan	40.000.000	24 Laporan	40.000.000	24 Laporan	40.000.000	24 Laporan	120.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 8.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	1.100.000.000	36 Laporan	1.100.000.000	36 Laporan	1.100.000.000	36 Laporan	3.300.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 8.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Laporan	1.351.000.00 0	11 Laporan	1.351.000.00 0	11 Laporan	1.351.000.00 0	11 Laporan	4.053.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 8.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		41 Laporan	3.935.600.000	41 Laporan	3.935.600.000	41 Laporan	3.935.600.000	41 Laporan	11.806.800.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	875.473.473	100%	875.473.473	100%	875.473.473	100%	2.626.420.419	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 9.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	195.000.000	20 Unit	195.000.000	20 Unit	195.000.000	20 Unit	585.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 9.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	284.473.473	10 Unit	284.473.473	10 Unit	284.473.473	10 Unit	853.420.419	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.0 9.09	Sub kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/ Direhabilitasi		3 Unit	197.000.000	3 Unit	197.000.000	3 Unit	197.000.000	3 Unit	591.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.0 9.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		100 Unit	199.000.000	100 Unit	199.000.000	100 Unit	199.000.000	100 Unit	597.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 1	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi		100%	918.948.930	100%	918.948.930	100%	918.948.930	100%	2.756.846.790	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 1.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/ Bulan	318.948.930	2 Orang/ Bulan	318.948.930	2 Orang/ Bulan	318.948.930	2 Orang/ Bulan	956.846.790	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 1.04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/ Bulan	600.000.000	2 Orang/ Bulan	600.000.000	2 Orang/ Bulan	600.000.000	2 Orang/ Bulan	1.800.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 2	Kegiatan Fasilitas Kerumahtangga n Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtangga n Sekretariat Daerah yang terfasilitasi		100%	2.453.531.59 7	100%	2.742.949.87 7	100%	2.742.949.87 7	100%	7.939.431.351	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		18 Paket	1.733.531.59 7	18 Paket	1.792.949.87 7	18 Paket	1.792.949.87 7	18 Paket	5.319.431.351	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	500.000.000	12 Paket	650.000.000	12 Paket	650.000.000	12 Paket	1.800.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.1 2.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		11 Paket	220.000.000	11 Paket	300.000.000	11 Paket	300.000.000	11 Paket	820.000.000	Bagian Umum	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun		100%	222.506.000	100%	277.506.000	100%	280.006.000	100%	780.018.000	bagian organisasi	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 3.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokume n	50.000.000	1 Dokume n	60.000.000	1 Dokume n	60.000.000	1 Dokume n	170.000.000	bagian organisasi	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	57.000.000	1 Laporan	32.000.000	1 Laporan	111.000.000	bagian organisasi	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 3.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokume n	22.000.000	2 Dokume n	32.000.000	2 Dokume n	26.000.000	2 Dokume n	80.000.000	bagian organisasi	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 3.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Dokume n	22.506.000	1 Dokume n	22.506.000	1 Dokume n	23.000.000	1 Dokume n	68.012.000	bagian organisasi	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dokume n	106.000.000	1 Dokume n	106.000.000	1 Dokume n	139.006.000	1 Dokume n	351.006.000	bagian organisasi	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		82%	200.876.000	83%	255.876.000	84%	258.376.000	84%	715.128.000	Bagian Protokol & Komunikas i pimpinan	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.2.1 4.01	fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan		40 Laporan	100.000.000	45 Laporan	155.000.000	48 Laporan	158.000.000	48 Laporan	413.000.000	Bagian Protokol & Komunikasi pimpinan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 4.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		18 Laporan	30.876.000	18 Laporan	30.876.000	18 Laporan	30.376.000	18 Laporan	92.128.000	Bagian Protokol & Komunikasi pimpinan	Kab. Bangkal an
		4.01.01.2.1 4.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan		5 Laporan	70.000.000	5 Laporan	70.000.000	5 Laporan	70.000.000	5 Laporan	210.000.000	Bagian Protokol & Komunikasi pimpinan	Kab. Bangkal an
	Meningkatny a Kinerja Penyelengga raan Pemerin tah Daerah			Persentase Rumusan Kebijakan Daerah yang menjadi Kebijakan Daerah		100%	8.684.328.000	100%	9.014.328.000	100%	9.029.328.000	100%	26.727.984.000		
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan		100%	7.349.691.000	100%	7.514.691.000	100%	7.522.191.000	100%	22.386.573.000	Bag. Pemerintah an Bag. Kesra Bag. Hukum	Kab. Bangkal an
				Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan, dan bantuan hukum yang diselesaikan		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02.2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100%	342.974.000	100%	397.974.000	100%	400.474.000	100%	1.141.422.000	Bagian Pemerintah an	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 1.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		5 Dokume n	130.291.350	5 Dokume n	165.372.250	5 Dokume n	167.872.250	5 Dokume n	463.535.850	Bagian Pemerintah an	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 1.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 Dokume n	126.630.150	3 Dokume n	126.630.150	3 Dokume n	126.630.150	3 Dokume n	379.890.450	Bagian Pemerintah an	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		4 Dokume n	86.052.500	4 Dokume n	105.971.600	4 Dokume n	105.971.600	4 Dokume n	297.995.700	Bagian Pemerintah an	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 2	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan		100%	6.847.604.00 0	100%	6.902.604.00 0	100%	6.905.104.00 0	100%	20.655.312.00 0	bagian kesra	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		31 Dokume n	1.400.000.00 0	31 Dokume n	1.455.000.00 0	31 Dokume n	1.457.500.00 0	31 Dokume n	4.312.500.000	bagian kesra	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02.2.0 2.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		6 Dokume n	2.760.000.000	6 Dokume n	2.760.000.000	6 Dokume n	2.760.000.000	6 Dokume n	8.280.000.000	bagian kesra	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 2.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		44 Dokume n	2.687.604.000	44 Dokume n	2.687.604.000	44 Dokume n	2.687.604.000	44 Dokume n	8.062.812.000	bagian kesra	Kab. Bangkal an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02.2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	159.113.000	100%	214.113.000	100%	216.613.000	100%	589.839.000	bagian hukum	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 3.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		3 Dokume n	59.113.000	3 Dokume n	94.113.000	3 Dokume n	94.613.000	3 Dokume n	247.839.000	bagian hukum	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 3.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		3 Kasus	50.000.000	3 Kasus	70.000.000	3 Kasus	72.000.000	3 Kasus	192.000.000	bagian hukum	Kab. Bangkal an
		4.01.02.2.0 3.02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		4 Dokume n	50.000.000	4 Dokume n	50.000.000	4 Dokume n	50.000.000	4 Dokume n	150.000.000	bagian hukum	Kab. Bangkal an
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tersusun		80%		100%		100%		100%		Bag. Perekonom ian dan SDA Bag. Adbang Bag. PBJ	Kab. Bangkal an
				Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan		100%	1.334.637.000	100%	1.499.637.000	100%	1.507.137.000	100%	4.341.411.000		
				Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ		100 indeks		100 indeks		100 indeks		100 indeks			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.2.0 1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bidang Perekonomian Yang Tersusun		3 Dokumen	58.453.000	3 Dokumen	98.453.000	3 Dokumen	100.953.000	3 Dokumen	257.859.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 1.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dok	33.453.000	1 Dok	58.453.000	1 Dok	60.953.000	1 Dok	152.859.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 1.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Lap	20.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	35.000.000	1 Lap	90.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 1.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	15.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Bidang Sumber Daya Alam Yang Tersusun		3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	105.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 4.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		1 Dok	15.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	75.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.2.0 4.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	15.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 4.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	15.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang Difasilitasi		100%	144.088.000	100%	199.088.000	100%	201.588.000	100%	544.764.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 2.01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah		1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kab. Bangkalan
		4.01.03.2.0 2.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	150.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kab. Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.2.0 2.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		18 Laporan	64.088.000	18 Laporan	99.088.000	18 Laporan	81.588.000	18 Laporan	244.764.000	Bagian Administrasi Pembangun an	Kab. Bangkal an
		4.01.03.2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Terfasilitasi		100%	1.107.096.00 0	100%	1.162.096.00 0	100%	1.164.596.00 0	100%	3.433.788.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupa ten Bangkal a
		4.01.03.2.0 3.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		5 Dokume n	330.000.000	5 Dokume n	330.000.000	5 Dokume n	330.000.000	5 Dokume n	990.000.000	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Kabupat en Bangkal a
		4.01.03.2.0 3.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		5 Dokume n	482.865.000	5 Dokume n	482.865.000	5 Dokume n	482.865.000	5 Dokume n	1.448.595.000	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Kabupat en Bangkal a
		4.01.03.2.0 3.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		68 Orang	294.231.000	68 Orang	349.231.000	68 Orang	351.731.000	68 Orang	995.193.000	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Kabupat en Bangkal a

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPD.

Memperhatikan tujuan RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, indikator kinerja Sekretariat Daerah mendukung dalam pencapaian tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dan dukungan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bangkalan diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD, seperti pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berkualitas					
	Indikator Tujuan :					
	Nilai SAKIP	(BB) 69.23	(BB) 70.23	(BB) 71.23	(BB) 72.25	(BB) 72.25
	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84,35	84,45	84,55	84,65	84,65
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah					
	Indikator Sasaran :					
	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah urusan Sekretariat Daerah					
	Indikator Sasaran :					
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	60	60,5	61	61,5	61,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	84	85	86	87	88

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	-	-	-	-
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	7,92%	8,95%	9,95%	10,95%	9,44%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	18,45%	19,50%	20,50%	21,50%	19,98%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu yang disusun berdasarkan program Pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain : prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasikinerja yang akan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Bangkalan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Bangkalan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Dalam Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus

menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 ini, dapat memberi banyak manfaat didalam meningkatkan kinerja, kami berharap adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**
Ir. H. MOH. TAUFAN ZS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640610 199202 1 002

